**PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS RESPONSIF GENDER
DI DESA PELANGKO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN
INDRAGIRI HULU PADA TAHUN 2015**

Hikmah Aidil Fitra

Email : aidilfitra01@yahoo.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S. Ip, M. Ip
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Keterkaitan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berbasis responsif gender di desa Pelangko tahun 2015 masih rendah, minimnya keterlibatan perwakilan perempuan dalam proses musrenbangdes, dan usulan dari masing-masing gender masih didominasi oleh gender laki-laki, hal ini menunjukkan perbedaan peran dan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis responsif dan apa saja faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan berbasis responsif gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis responsif gender dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan berbasis responsif gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menguraikan tentang permasalahan dan pemecahan terhadap subjek penelitian dengan jelas dan rinci.

Hasil penelitian ini adalah Penelitian ini menemukan bahwa Proses pelaksanaan muswarah perencanaan pembangunan desa berbasis gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan adanya usul kebutuhan pokok gender perempuan, memberdayakan dan keterwakilan perempuan dalam urusan pemerintahan sedangkan penganggaran berbasis gender Faktor penghambat dalam pelaksanaan musrenbang desa berbasis gender adalah: Masih dipengaruhi faktor budaya patriarki, kurang respon dan tanggap dalam bidang politik dan pemerintahan, kurangnya pengalaman, malu berpendapat, serta sumberdaya manusia yang rendah dari segi pendidikannya.

Kata Kunci: Keterwakilan Penganggaran, Responsif Gender

**GENDER RESPONSIVE BASED DEVELOPMENT PLANNING
IN THE VILLAGE VILLAGES OF REGIONAL SUBSTANCE OF
INDRAGIRI REGENCY IN 2015**

Hikmah Aidil Fitra

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293. Telp./Fax 0761-63277

ABSTRACT

Community linkages in gender-responsive development process based planning process in Pelangko Village in 2015 are still low, lack of involvement of women representatives in musrenbangdes process, and suggestions from each gender is still dominated by male gender, it shows the different role and social relation between men and women

The formulation of the problem in this research is how the implementation process of responsive based development planning and what are the constraining factors in gender responsive development planning in Pelangko Village, Kelayang Sub-district, Indragiri Hulu Regency in 2015.

This study aims to find out the process of implementing gender-responsive development planning and to know the inhibiting factors in gender-responsive development based planning in Pelangko Village, Kelayang Sub-district, Indragiri Hulu Regency in 2015.

This research uses qualitative research method with descriptive research type which describes about problem and solving to research subject with clear and detail.

The result of this research is this research found that the process of implementation of gender-based village development planning village in Pelangko Village, Kelayang Sub-district, Indragiri Hulu Regency is done with the suggestion of women's principal need, empower and representation of woman in government affair while gender-based budgeting Inhibiting factor in village musrenbang based on gender are: Still influenced by patriarchy culture factor, lack of response and responsiveness in politics and government, lack of experience, shy opinion, and low human resource in terms of education.

Keywords: Representation of Budgeting, Responsive Gender

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Ketimpangan dan kurangnya peran serta perempuan dan rendahnya Kualitas Hidup Perempuan (KHP), secara umum mengakibatkan lambatnya keberhasilan dalam Pembangunan. Padahal bila kualitas hidup perempuan rendah dan tidak diajak untuk berperan serta dalam pembangunan, maka perempuan akan menjadi beban pembangunan. Sebaliknya, bila perempuan diberi kepercayaan untuk berperan dalam pembangunan nasional, maka perempuan akan menjadi mitra sejajar bagi laki-laki yang ikut bahu-membahu dan meringankan beban pembangunan.

Namun pada kenyataannya, saat ini seringkali terjadi minimnya peran serta perempuan dan rendahnya kualitas hidup perempuan, yang secara umum dapat mengakibatkan lambatnya keberhasilan dalam Pembangunan desa.

Responsif Gender pada saat Musrenbangdes di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 80 ayat 3 dijelaskan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di desa harus melibatkan unsur masyarakat yang terdiri atas Perwakilan Kelompok Perempuan. Namun pada kenyataannya musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang

Kabupaten Indragiri Hulu didapati masih minimnya keterlibatan unsur masyarakat yang terdiri atas perwakilan kelompok perempuan. Pada musrenbangdes tahun 2015, dilihat dari masing-masing gender yang hadir laki-laki sebanyak 24 orang dari 30 orang yang diundang, sedangkan perempuan sebanyak 4 orang dari 10 orang yang diundang. Artinya keterlibatan dari masing-masing gender menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Berikut ini tabel daftar hadir musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu berbasis responsif gender didesa pelangko dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Daftar Hadir Musrenbangdes
Berbasis Responsif Gender Di Desa
Pelangko Kecamatan Kelayang
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2015

No	Nama	Klasifikasi	Gender
1	Harmadi	Kepala Desa	Laki-Laki
2	Mugiono	Ketua LPMD	Laki-Laki
3	Mukhair	Ketua BPD	Laki-Laki
4	Suhermi	Ketua PKK	Perempuan
5	Susilawati	Kelompok Perempuan	Perempuan
6	Ali Hasan	Sekdes	Laki-Laki
7	Syarif. KH	Kaur Umum	Laki-Laki
8	Hendra Putra	OP	Laki-Laki
9	Winarto	Ketua Karang Taruna	Laki-Laki
10	Nurbaiti	Kelompok Perempuan	Perempuan
11	Erdi	Anggota LPM	Laki-Laki

12	M Siregar	Ketua RT 09	Laki-Laki
13	Maaruf	Ketua RW 03	Laki-Laki
14	Tusiman	Rw 04	Laki-Laki
15	Indra	RW 13	Laki-Laki
16	Darji	RW 02	Laki-Laki
17	Nurita	Kelompok Perempuan	Perempuan
18	Asmar. AR	Anggota BPD	Laki-Laki
19	A Rahim	Tokoh Masyarakat	Laki-Laki
20	Jusri	Anggota BPD	Laki-Laki
21	Marwan	Ketua RT 02	Laki-Laki
22	Darmawi	Kadus 01	Laki-Laki
23	M. Rasyid	Ketua RT 07	Laki-Laki
24	Dadang	Anggota BPD	Laki-Laki
25	Winarto	Wakil BPD	Laki-Laki
26	Tukijo	Guru	Laki-Laki
27	Tusino	Pemuda	Laki-Laki
28	Togi	Pemuda	Laki-Laki

Sumber : Data Olahan 2015

Pada penjelasan tabel di 1 atas dapat dilihat bahwa peserta musrenbangdes berjumlah 28 orang, dan dilihat dari perbedaan gender, laki-laki sebanyak 24 orang sedangkan perempuan sebanyak 4 orang. Satu hal permasalahan yang sangat terlihat pada tabel ini yakni terdapat perbedaan signifikan dari masing-masing gender. Dimana kehadiran didominasi oleh gender laki-laki dan hanya sedikit gender perempuan yang terlibat pada musrenbangdes tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa di desa pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu musrenbangdes dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2008.

Dari 28 orang yang hadir telah mengusulkan usulan kegiatan

pembangunan desa di desa pelangko yang berbasis responsif gender berjumlah 45 usulan yang dihasilkan, dan dilihat dari peran masing-masing gender dalam pengajuan usulan pembangunan tersebut, usulan gender laki-laki berjumlah 32 usulan sedangkan usulan gender perempuan berjumlah 13 usulan. Sehingga bisa disimpulkan usulan gender laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dari usulan yang dihasilkan dari gender perempuan.

Selanjutnya dilihat dari jumlah usulan yang terealisasi dapat dilihat bahwa jumlah usulan pembangunan dari gender laki-laki 32 usulan yang terealisasi berjumlah 17 usulan, sedangkan usulan dari responsif gender perempuan berjumlah 13 usulan yang terealisasi 9 usulan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa usulan responsif gender laki-laki lebih banyak yang terealisasi daripada usulan pembangunan yang berasal dari responsif gender perempuan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan didalam latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berbasis responsif gender di desa Pelangko pada tahun 2015 terlihat masih rendah, ini dapat dilihat dari daftar hadir musrenbangdes di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2015 yang hadir hanya 28 orang dari 40 yang telah di undang.
2. Minimnya keterlibatan perwakilan perempuan dalam

proses musrenbangdes di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2015, ini juga dapat dilihat dari daftar hadir musrenbangdes, dilihat dari masing-masing gender yang hadir laki-laki sebanyak 24 orang dari 30 orang yang diundang, sedangkan perempuan sebanyak 4 orang dari 10 orang yang diundang.

3. Usulan dari masing-masing gender masih didominasi oleh gender laki-laki, hal ini terbukti dari daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa Pelangko pada tahun 2015, dari 45 usulan yang ada dilihat dari peran masing-masing gender usulan dari gender laki-laki berjumlah 32 usulan sedangkan usulan gender perempuan berjumlah 13 usulan, ini terlihat jelas bahwa usulan masih sangat di nominasi oleh gender laki-laki.

Dengan melihat fenomena-fenomena di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan berbasis responsif gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu masih menunjukkan adanya perbedaan peran dan relasi sosial antara gender laki-laki dan gender perempuan. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana sesungguhnya perencanaan pembangunan desa berbasis responsif gender di Desa Pelangko. Berdasarkan keadaan yang terdapat di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Perencanaan Pembangunan Berbasis Responsif Gender Di Desa Pelangko Kecamatan**

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Pada Tahun 2015”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis responsif gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2015 ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan berbasis responsif gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015 ?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis responsif gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan berbasis responsif gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015.

Manfaat Penelitian:

1. Secara praktis, yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan, serta memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat menciptakan perencanaan pembangunan responsif gender yang lebih baik.
2. Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi

kepastakaan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Kerangka Teori

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat desa bisa menikmati

Responsif Gender

Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender.

Kebutuhan Gender

Kebutuhan gender meliputi:

1. Kebutuhan Praktis Gender misalnya: pengadaan air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan untuk meningkatkan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, penyediaan rumah dan layanan kebutuhan dasar, pembagian makanan, dan seterusnya.
2. Kebutuhan strategis gender: mencakup persoalan-persoalan seperti hak atas hukum, kekerasan dalam rumah tangga, persamaan gaji, dan kontrol perempuan atas dirinya.

Anggaran Responsif Gender

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat,

berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan faktatatif.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam Penelitian ini Data primer yang dimaksud adalah : Kebutuhan perempuan, keterlibatan perempuan, dan pemberdayaan perempuan, keterlibatan perempuan, responsif gender, serta anggaran berbasis responsif gender.

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya seperti dikutip dari berbagai sumber, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, koran, dan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara Tanya-jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.

b. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan. Data dimuat dalam tabel dan diuraikan dalam bentuk hasil wawancara. Selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Berbasis Responsif Gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Pada Tahun 2015

Proses perencanaan yang dimaksud di sini adalah perencanaan pembangunan desa di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2015, meliputi: Usulan Kebutuhan perempuan, responsif gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan dan penganggaran berbasis gender.

Kebutuhan Perempuan

1. Kebutuhan strategis

Tabel 2
Kebutuhan Praktis Gender Perempuan

No	Jenis Kebutuhan Praktis Gender Perempuan
1	Pembangunan gedung posyandu
2	Pembangunan rumah bidan desa
3	Pembinaan PKK
4	Honor PKK
5	Seragam PKK
6	Pengadaan mesin jahit

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan-kebutuhan praktis gender perempuan merupakan kebutuhan mendasar yang mendasar, berkaitan dengan kondisi nyata (konkrit) dalam kelangsungan hidup sehari-hari. seperti: bidang kesehatan (pembangunan pos yandu dan rumah bidan desa), bidang ekonomi (pembinaan PKK, honor PKK dan seragam PKK).

2. Kebutuhan Strategis Gender Perempuan

Tabel 3
Kebutuhan Strategis Gender Perempuan

No	Jenis Kebutuhan Strategi Gender Perempuan
1	Majelis taklim
2	Wirid yasin
3	Latihan rabana
4	Pembuatan sanggar seni anak-anak
5	Pengadaan alat seni rabana
6	Pengadaan seragam yasin
7	Pengadaan seragam rabana

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan diatas dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan strategis bagi gender perempuan di Desa Pelangko, merupakan kebutuhan yang bersifat keagamaan dan seni.

Diketahui bahwa usulan yang diajukan pada rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa didasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi gender perempuan di desa Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015, baik itu kebutuhan praktis maupun strategis.

Responsif Gender

Responsif gender merupakan tanggapan dan perhatian yang diberikan terhadap perbedaan-

perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan atau persamaan gender.

Tabel 4

Daftar Realisasi Usulan Kebutuhan Perempuan Desa Pelangko Berbasis Responsif Gender Pada Tahun 2015

No	Daftar Usulan	Realisasi
1	Majlis Taklim	Terealisasi
2	Wirid Yassin	Terealisasi
3	Latihan Rabana	Terealisasi
4	Pembuatan sanggar seni anak-anak	Tidak Terealisasi
5	Pengadaan alat kesenian rabana	Terealisasi
6	Pembangunan gedung posyandu	Tidak Terealisasi
7	Pembangunan rumah bidan desa	Tidak Terealisasi
8	Pembinaan PKK	Tidak Terealisasi
9	Pengadaan seragam yasin	Terealisasi
10	Pengadaan seragam rabana	Terealisasi
11	Pengadaan mesin jahit	Terealisasi
12	Honor PKK	Terealisasi
13	Seragam PKK	Terealisasi

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa dari 13 usulan dari kelompok perempuan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015 yang terealisasi ada 9 usulan dan tidak terealisasi ada 4 usulan.

Meskipun usulan kebutuhan itu tidak terealisasi, bukan berarti kesetaraan gender laki-laki dan perempuan diabaikan. Karena responsif gender ini juga mengacu atau berpedoman pada pertimbangan

dan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada manfaat dan kontrol atau pengawasan.

Pemberdayaan Perempuan dan Keterwakilan Perempuan

a. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan mendayakan Sumber Daya Manusia perempuan yang mempunyai kemampuan dan keamanan guna kemandirian, dengan bakat kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, sehingga tidak bergantung lagi pada laki-laki.

Tabel 5

Daftar Usulan yang Seharusnya Memberdayakan Perempuan Tahun 2015

No	Daftar Usulan	Yang Mengusulkan	Realisasi
1	Tempat Belajar Masyarakat (TBM)	Tokoh Masyarakat	Tidak Terealisasi
2	Seragam olah raga pemuda	Tokoh Pemuda	Tidak Terealisasi
3	Pelatihan remaja / pemuda	Tokoh Pemuda	Tidak Terealisasi
4	Pelatihan home industry	Tokoh Masyarakat	Tidak Terealisasi

Sumber: Data Olahan, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa usulan yang telah diajukan oleh gender laki-laki pada musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Pada Tahun 2015 seperti: Tempat Belajar Masyarakat (TBM), seragam olah raga pemuda, pelatihan remaja/pemuda dan pelatihan *home industry* yang diusulkan pada tahun

anggaran 2015 tidak ada yang terealisasi.

b. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan merupakan keikutsertaan perempuan untuk mewakili kelompoknya dalam berbagai proses keterlibatan di segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Tabel 6
Daftar Hadir Undangan
Keterwakilan Perempuan Pada
Musrenbangdes Di Desa
Pelangko Tahun 2015

No	Nama	Klasifikasi	Kehadiran
1	Suhermi	Ketua PKK	Hadir
2	Marwah	Kelompok perempuan	Tidak hadir
3	Eva	Wakil ketua LPM	Tidak hadir
4	Sariyem	Kaur Pemerintahan	Tidak hadir
5	Ernawati	Guru	Tidak hadir
6	Susilawati	Kelompok perempuan	Hadir
7	Siti Aini	Kelompok perempuan	Tidak hadir
8	Murniyati	Kelompok perempuan	Tidak hadir
9	Nurbaiti	Kelompok perempuan	Hadir
10	Nurita	Kelompok perempuan	Hadir

Sumber : Data Olahan 2015

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari 10 undangan yang diberikan kepada kelompok perempuan ternyata hanya dihadiri oleh 4 orang undangan atau sebesar 40%. Sedangkan yang tidak hadir sebanyak 6 orang atau sebesar 60%. Dengan demikian lebih banyak gender perempuan yang tidak hadir

bila dibandingkan dengan gender perempuan yang hadir.

Penganggaran Berbasis Responsif Gender

Anggaran berbasis gender merupakan anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Penganggaran berbasis gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Sumber anggaran pendanaan perencanaan Pembangunan Desa :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja (APB)-Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan demikian, penganggaran berbasis gender merupakan:

1. Penyusunan anggaran guna menjawab menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran.
2. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

3. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki

b. Faktor Penghambat Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Responsif Gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015

Beberapa faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan berbasis responsif gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015, diantaranya sebagai berikut:

1. Dipengaruhi budaya patriarki
2. Kurang respon atau tanggap
3. Kurang Pengalaman
4. Malu Berpendapat
5. Tingkat pendidikan yang rendah

Penutup

1. Kesimpulan

- a. Proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa berbasis gender di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan adanya usul kebutuhan pokok dari gender perempuan, dalam hal ini kebutuhan pokok perempuan diusulkan hanya berjumlah 13 usulan dari 45 keseluruhan usulan berbasis gender. Pemberdayaan gender perempuan belum optimal, karena tidak seluruh bidang pembangunan desa dapat diusulkan oleh kaum gender perempuan. Keterlibatan gender

perempuan hanya terbatas pada kebutuhan pokok khusus perempuan saja. Keterwakilan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum terwakilkan karena ketidakhadiran gender perempuan untuk mewakili kelompoknya, sedangkan penganggaran berbasis gender didasarkan pada mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Penganggaran berbasis gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa berbasis gender adalah: Masih dipengaruhinya faktor budaya patriarki, kurang respon dan tanggap dalam bidang politik dan pemerintahan, rendahnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ini karena kurangnya pengalaman, malu berpendapat, serta sumberdaya manusia yang rendah dari segi pendidikannya.

2. Saran

- a. Musyawarah perencanaan pembangunan desa hendaknya dilakukan melalui prosedur dan tahap yang lebih sistematis dengan melibatkan atau mengikut sertakan perempuan untuk menyampaikan usul sesuai kebutuhan gender perempuan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun dan

mengimplementasikan penganggaran berbasis gender dalam upaya memberikan jawaban untuk mengatasi kesenjangan gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

- b. Hendaknya pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemangku kepentingan yang aktif dalam bidang politik dan pemerintahan dapat memberikan motivasi kepada gender perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

DAFTAR USTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Andy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Adi, Sasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- _____.2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ateng Syafrudin dan Suprin. 2010, *Republik Desa*, Bandung, Alumni.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Gaus, F Gerald dan Chandran Kukathas. 2012. *Handbook Teori Politik*. Bandung : Nusa Media.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hardiman, Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Habermas*. Yogyakarta : Kanisius.
- Hendratno. 2009. *Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang : Bayu Media dan UMM.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta. PT. Raja Grafinso Persada.
- Sadu Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, Vokus Media.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.

Sondang P. Siagian, 2011, *Pembangunan Jangka Panjang*, Yogyakarta. Caps.

Subiyantoro, Arif. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Taliziduhu.Dhara.2013. *Dimensi Pemerintahan desa*. Jakarta : Bumi Aksara,

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa Saatnya Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat*. Jakarta : PT Gramedia.

Agusni, Sulikant. 2010. *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Perdagangan.

Jurnal

Cristian, Harry. *Jurnal Pemerintahan Integratif* 2015. Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dewi, Utami. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Desa* 2015. Pendekatan Community Learning And Participatory Process (Clapp).

Siti Nurul Qoriah dan Titik Sumarti, Vol. 02, No. 02, 2008 . Analisis Gender dalam Program Desa Mandiri Pangan Studi Kasus: Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Klaten-Jawa Tengah.

Skripsi

Mahendra. *Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Pekanbaru* 2016. Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009-2013.

Nugroho, Mochammad Rindo. *Skripsi Strata Satu Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 Tentang
pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan di
desa harus melibatkan unsur
masyarakat yang terdiri atas
perwakilan kelompok
perempuan yang di tuangkan
pada pasal 80 ayat 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di
Daerah.

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2000 tentang
Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan
Nasional.

Peraturan Daerah Indragiri Hulu
Nomor 10 Tahun 2008
tentang musyawarah
pembangunan di desa dan
kelurahan.

Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDDes) Di Desa Pelangko
Kecamatan Kelayang
Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2015.